

PENDAHULUAN

Setelah sekian lama terpenjara dalam politik sentralisasi oleh pemerintah pusat, daerah-daerah di Indonesia menjadi bisu terhadap aspirasi masyarakat lokal. Daerah tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan kontestasi politik ditingkat lokal. Baru setelah Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah digulirkan dan diberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan demokrasi lokal dengan cara memilih Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung. Tahun 2005 untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) “sekarang Pemilukada” secara langsung di Indonesia. Pemilukada langsung ini merupakan amanat konstitusi dan tentu saja adalah bagian dari proses penguatan demokrasi lokal dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah.

[illegible]

penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya materialistis. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Masyarakat kota merupakan suatu masyarakat yang heterogen, baik dalam hal mata pencaharian, agama, adat, dan kebudayaan

Pilkada yang akan dilaksanakan di daerah pun diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan berpolitikan di tingkat lokal, membawa nilai-nilai identitas lokal baik secara sosio-ekonomi, politik, serta budaya masyarakat. Undang-undang pilkada menghendaki terlaksananya pemilihan secara tertib berdasarkan peraturan yang ada, akan tetapi sering menjadi masalah yang muncul adalah para kandidat kurang mendukung, mengikuti proses secara baik berdasarkan peraturan yang telah dibuat, sehingga yang terjadi adalah ketimpangan, terkikisnya nilai-nilai demokrasi dengan agenda politik hitam yang dijalankan untuk memperjuangkan harga suara dalam pemilu nantinya, tanpa melihat serta mengedepankan nilai-nilai khas lokal yang dijunjung oleh warga masyarakat lokal.

Sebagai bentuk melaksanakan demokrasi politik lokal dalam pelaksanaan pilkada untuk memilih kepala daerah yang berkualitas, bermoral, tentunya ke depan diharapkan Kepala daerah benar-benar mengerti permasalahan masyarakat lokal dan mampu melaksanakan kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan warga Negara.

Tidak heran modal sosial yang ada dalam masyarakat lokal digunakan oleh politisi, elit lokal dalam memenuhi kepentingan pemilihan kepala daerah. Secara

logika maka modal sosial seperti, munculnya identitas, suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain, yang tentunya merupakan elemen-elemen politik yang tidak bisa dihindari harus bersentuhan dengan persoalan politik. Politik identitas muncul akibat bagian dari elemen politik sebagai modal sosial dalam masyarakat lokal. Tetapi yang menjadi titik fokus ketika politik identitas turut dilibatkan proses pemilihan kepala daerah oleh elit lokal dijadikan tameng politik dengan muatan yang tidak logis, tetapi rasional bagi elit yang mempunyai kepentingan, memperjuangkan apa yang diinginkan.

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Demokrasi. Negara yang berdasarkan demokrasi akan mendapatkan kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui proses pemilihan umum. Dalam pelaksanaan demokrasi, Indonesia mengadakan pemilihan umum baik presiden, legislative, gubernur, walikota dan bupati serentak dalam lima tahun sekali. Dan semuanya telah diatur sedemikian rupa oleh komisi pemilihan umum (KPU)

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur serta wilayah Indonesia bagian timur. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di tepi pantai utara Pulau

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam perpolitikan ada saja pihak-pihak yang berkepentingan dan selalu bermain di belakang panggung politik yang tujuannya adalah jabatan dan kekuasaan, hal ini tidak bisa dihindarkan dengan perubahan para elit politik partai penguasa yang memiliki kepentingan individual yang hanya ingin menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan kaum dibawahnya yaitu rakyat yang semakin hari semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dinamika elit politik selalu menjadi hal menarik untuk dibahas, karena sifatnya selalu berubah sesuai kondisi zaman dan tidak terikat pada ruang dan waktu. Dimana kemudian persoalan elit politik ini akan selalu berkutat pada kepentingan dan kekuasaan semata. Dinamika dalam konteks politik adalah gerak atau kekuatan politik yang dimiliki dan dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan elite politik adalah individu atau kelompok yang secara kuantitas kecil, namun mempunyai akses dan power yang mana dalam hal ini biasanya menempati lapisan atas dalam lapisan masyarakat.

Kedudukan elit yang berada pada posisi sosial yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya, terdapat suatu logika sederhana yang bisa kita tarik mengapa kemudian mereka yang menanamkan dirinya elite tersebut. Bagi elit, kelebihan yang mereka miliki, sebagai mana dikemukakan oleh Keller, membuat elit menjadi magnet kekuasaan yang berpotensi untuk mampu melakukan segala hal.

Dalam konteks perpolitikan yang ada di dunia, elit yang kini banyak memilih untuk terjun ke dalam ranah politik, seyogyanya bukanlah mereka yang paham akan ilmu-ilmu politik sebagaimana seharusnya dimiliki oleh seorang politisi guna mengelola tata Negara. Bahkan politik sendiri menjadi magnet yang memikat seluruh kalangan, meskipun mereka sebelumnya bukanlah termasuk sebagai kalangan elit.

Politik individu inilah dapat diasumsikan bahwa peran elit dalam hal pengambilan keputusan maupun kebijakan menjadi salah satu faktor paling penting bagaimana hal tersebut akan diambil dan berjalan. Budaya seperti inilah yang kemudian merembet pada kalangan elit yang berda pada kasta terbawah. Bukan karena ketokohan elit tersebut yang menjadi penentu kenapa kemudian politik elit tersebut berjalan, namun lebih dikarenakan keyakinan elit daerah bahwa mereka telah melakukan banyak hal, termasuk pengorbanan financial untuk mencapai posisi yang menjadikan dirinya sebagai pemegang kekuasaan di daerah. Disini dapat dilihat bahwa kemudian elit politik yang menjadi bidak penentu dalam hal bagaimana kemudian sebuah partai politik memainkan peran mereka dalam peraturan politik.

Peneliti ingin mengambil judul “DINAMIKA ELIT POLITIK PARTAI DEMOKRAT” (Studi Kasus Pencalonan Rasio-Lucy Dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2015) karena didalam partai demokrat ini banyak elit politik yang menggunakan jabatan sebagai kekuasaan demi kepentingan masing-masing elit partai.

- #### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian dan penyajian yang telah ada, ditemukan karya ilmiah baik berupa skripsi, thesis, dan buku yang seallur dengan tema kajian penelitian ini. Berikut hasil usaha penelusuran tentang karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini:

- Hasil : Dinamika elite dalam suatu masyarakat berjalan dan kemudian terjadi sebuah wacana pemakzulan seorang elite yang ada dalam daerah tersebut. Dalam kasus wacana pemakzulan walikota Surabaya, Tri Risma, dinamika elite tarik menarik kepentingan guna melengserkan walikota perempuan pertama di Surabaya ini. Hadirnya kepentingan elite tak hanya berasal dari kalangan politisi semata, namun juga atas desakan dari elite pengusaha yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Tri Risma mengingat tak sedikit politisi yang menggugat Tri Risma, yakni sebagian besar kalangan DPRD Kota Surabaya merupakan elite pengusaha di sisi lain serta terdapat pula politisi yang memiliki hubungan erat dengan elite pengusaha. Dalam perjalanannya wacana pemakzulan Tri Risma ini memiliki dinamika yang sangat menarik setelah di kaji lebih dalam. Dinamika pemakzulan yang bermula dari salah satu kebijakan risma yang dirasa kurang menguntungkan bagi sebagian pihak ini, yakni kebijakan pajak reklame sebagai salah satu contoh, menjadi awal dari kebijakan para politisi DPRD Surabaya yang kemudian bertransformasi menjadi Surat Keputusan DPRD Kota Surabaya No. 02

2. Noviano Suyide, *Rekrutmen Politik Kepala Daerah Kota Surabaya 2010 (Studi Dinamika Rekrutmen Politik Calon Walikota Surabaya di Internal DPC PDI-Perjuangan)* 2013. Skripsi. Program Studi Politik Islam, Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya

[illegible]

memberikan gambaran se jelas mungkin mengenai bagaimana dinamika kepentingan elite politik, baik itu dalam hal kepentingan-kepentingan yang ada, proses muncul dan berjalannya negosiasi politik antar elite, serta aktor-aktor yang berperan dalam proses rekrutmen calon walikota Surabaya di internal PDI Perjuangan. Dari rumusan masalah diatas, kesimpulan yang diemukan dalam penelitian ini adalah: Pertama, adanya oligarki partai yang membuat perbedaan nama bakal calon dan calon kepala daerah dalam hierarki struktural partai. Kedua, PDIP mengambil langkah yang tepat dengan menggunakan survei sebagai salah satu landasan ilmiah dalam penetapan calon kepala daerah yang diusungnya dalam Pilwali Surabaya 2010, walaupun dengan dinamika partai sebagai konsekuensi demokrasi.